

Pengambilan Keputusan Sekolah dalam Penerapan Kebijakan Kedisiplinan Siswa di SMP Negeri 43 Padang

Muhammad Aziz Harahap^{1*}

¹ Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 20 Juli 2026

Direvisi pada tanggal 21 Juli 2026

Diterima pada tanggal 23 Juli 2026

Terbit online pada tanggal 30 Juli 2026

Kata kunci:

Pengambilan Keputusan, Kebijakan Pendidikan, Kedisiplinan Siswa, Kepala Sekolah



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan sekolah dalam penerapan kebijakan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 43 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan kedisiplinan serta wawancara dengan pihak sekolah yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan kedisiplinan siswa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penyusunan alternatif solusi, analisis alternatif, pemilihan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi hasil keputusan. Dalam penerapannya, sekolah melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Kebijakan kedisiplinan yang diterapkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran siswa dan lebih mengutamakan pendekatan pembinaan dibandingkan hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan sekolah telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan konsep pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan. Keberhasilan penerapan kebijakan kedisiplinan dipengaruhi oleh kerja sama antar warga sekolah serta dukungan dari orang tua siswa.

Penulis Korespondensi:

Muhammad Aziz Harahap

Email: azyss2710@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sekolah merupakan organisasi pendidikan yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara terarah dan berkesinambungan. Keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan pendidikan secara efektif. Mulyasa (2017) menegaskan bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu menjalankan fungsi manajerialnya secara optimal, termasuk dalam merespons berbagai dinamika dan tantangan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternalnya. Salah satu permasalahan yang secara konsisten dihadapi oleh sekolah dan berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan pendidikan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan siswa.

Kedisiplinan siswa merupakan salah satu aspek krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, kondusif, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari keterlambatan, pengabaian tata tertib sekolah, ketidakaktifan dalam pembelajaran, hingga pelanggaran yang tergolong berat, apabila tidak ditangani secara tepat dan sistematis, berpotensi mengganggu stabilitas proses pendidikan secara keseluruhan. Wiyani (2013) mengemukakan bahwa kedisiplinan bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap aturan, melainkan merupakan fondasi pembentukan karakter siswa yang

akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas individu di masa mendatang. Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memegang peran yang sangat strategis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kedisiplinan siswa.

Pengambilan keputusan dalam lingkungan sekolah merupakan proses yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penentuan tindakan atas suatu permasalahan, karena melibatkan pertimbangan multidimensi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi individual siswa, regulasi yang berlaku, nilai-nilai pendidikan, serta dampak jangka panjang terhadap perkembangan karakter peserta didik. Usman (2019) menyatakan bahwa kualitas pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana proses tersebut melibatkan analisis yang mendalam, data yang akurat, serta keterlibatan pihak-pihak yang relevan secara kolaboratif. Oleh karena itu, keputusan yang diambil tidak dapat bersifat reaktif semata, melainkan harus didasarkan pada proses yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada tujuan pendidikan.

Penanganan pelanggaran kedisiplinan siswa memerlukan kerangka kebijakan yang sistematis agar setiap tindakan yang diambil tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pembinaan karakter secara efektif. Dalam praktiknya, sekolah memiliki berbagai pilihan tindakan yang dapat diterapkan, mulai dari pemberian teguran lisan, pembinaan intensif, penugasan sanksi edukatif, pemanggilan orang tua, hingga penanganan berjenjang oleh guru BK dan kepala sekolah. Arifin dan Barnawi (2012) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan kedisiplinan di sekolah sangat bergantung pada konsistensi penerapannya serta kesesuaian antara bentuk tindakan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Dengan demikian, dibutuhkan proses pengambilan keputusan yang terstruktur agar kebijakan yang diterapkan dapat sekaligus memberikan efek pembelajaran dan membentuk budaya disiplin yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis proses pengambilan keputusan sekolah dalam penerapan kebijakan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 43 Padang sebagai objek kajian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana tahapan pengambilan keputusan dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam merespons berbagai permasalahan kedisiplinan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara proses pengambilan keputusan yang diterapkan dengan teori-teori pengambilan keputusan yang relevan dalam kajian administrasi pendidikan, khususnya model Simon dan kerangka Terry. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi penguatan tata kelola kebijakan kedisiplinan di sekolah menengah pertama.

2. KAJIAN TEORI

Pengambilan keputusan merupakan salah satu aktivitas fundamental dalam organisasi karena berkaitan langsung dengan penentuan arah tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terry (dalam Syamsi, 2000) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang tersedia guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, Simon (dalam Salusu, 2015) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang dianggap paling sesuai melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan rasional. Dengan demikian, pengambilan keputusan bukan sekadar aktivitas memilih, melainkan sebuah proses intelektual yang memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai kemungkinan tindakan beserta konsekuensinya.

Dalam konteks organisasi pendidikan, pengambilan keputusan menempati posisi yang sangat strategis sebagai bagian integral dari fungsi manajemen sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2017), kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki tanggung jawab penuh dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, termasuk kebijakan yang menyangkut pembinaan dan kedisiplinan siswa. Hal ini diperkuat oleh Usman (2019) yang menegaskan bahwa efektivitas manajemen sekolah sangat ditentukan oleh kualitas keputusan yang diambil oleh pimpinan dalam merespons berbagai persoalan kelembagaan. Oleh karena itu, kemampuan pengambilan keputusan yang baik merupakan kompetensi manajerial yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.

Herbert Simon merumuskan model pengambilan keputusan yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu *intelligence*, *design*, dan *choice*, yang menjadi kerangka analitis dalam memahami proses keputusan secara sistematis. Pada tahap *intelligence*, pengambil keputusan melakukan pengenalan dan pemahaman terhadap masalah yang terjadi di lingkungan organisasi melalui pengumpulan informasi yang relevan. Tahap *design* mencakup proses penyusunan dan pengembangan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang memungkinkan untuk diterapkan. Adapun tahap *choice* merupakan tahap akhir berupa pemilihan alternatif

terbaik yang dinilai paling mampu menyelesaikan permasalahan secara optimal (Salusu, 2015). Model ini relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian tentang kebijakan kedisiplinan di sekolah karena mencerminkan proses berpikir rasional yang seharusnya mendasari setiap keputusan manajerial.

George R. Terry menguraikan proses pengambilan keputusan ke dalam enam langkah yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil keputusan, sebagai panduan dalam menghasilkan keputusan yang berkualitas. Keenam langkah tersebut meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan alternatif, pemilihan alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh (Terry, dalam Syamsi, 2000). Kerangka langkah-langkah ini menegaskan bahwa keputusan yang baik tidak dapat dihasilkan secara impulsif, melainkan harus melewati proses analisis dan pertimbangan yang matang berdasarkan data yang valid. Pendapat ini diperkuat oleh Kristiawan et al. (2019) yang menyatakan bahwa kualitas keputusan dalam manajemen pendidikan sangat bergantung pada kelengkapan informasi yang dimiliki serta ketepatan dalam mengevaluasi setiap alternatif yang tersedia.

Pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan kedisiplinan siswa harus dilandasi oleh perspektif pendidikan yang menempatkan pembinaan karakter sebagai tujuan utama, bukan semata-mata pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Kebijakan disiplin sekolah yang efektif, sebagaimana dijelaskan oleh Arifin dan Barnawi (2012), adalah kebijakan yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga konstruktif dalam membentuk kesadaran siswa akan pentingnya tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini sejalan dengan temuan Wiyani (2013) yang menegaskan bahwa pengelolaan disiplin siswa yang berbasis pembinaan terbukti lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan hukuman. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam kebijakan kedisiplinan harus mampu mengintegrasikan fungsi penegakan aturan dengan fungsi pedagogis demi terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan karakter siswa.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pengambilan keputusan sekolah dalam penerapan kebijakan kedisiplinan siswa. Pendekatan kualitatif dipilih karena, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2017), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan ini dinilai sesuai karena fokus penelitian terletak pada proses, pertimbangan, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menangani permasalahan kedisiplinan, bukan pada pengukuran variabel secara numerik. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai dinamika pengambilan keputusan di lingkungan sekolah.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 43 Padang pada tanggal 21 Mei 2026 dengan melibatkan subjek penelitian yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kedisiplinan. Pemilihan subjek secara purposif sejalan dengan pandangan Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru bimbingan dan konseling (BK), serta guru mata pelajaran yang secara langsung terlibat dalam penanganan permasalahan kedisiplinan siswa. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang representatif dan komprehensif mengenai mekanisme pengambilan keputusan di sekolah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang diterapkan secara komplementer untuk memperoleh data yang valid dan menyeluruh. Observasi dilaksanakan guna mengamati secara langsung penerapan kebijakan kedisiplinan di lingkungan sekolah, sementara wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Penggunaan ketiga teknik ini sejalan dengan pendapat Creswell (2016) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti lazimnya mengumpulkan beragam bentuk data melalui observasi, wawancara, dan dokumen, alih-alih mengandalkan satu sumber data tunggal. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa tata tertib sekolah dan catatan pelanggaran siswa, yang berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi temuan dari hasil observasi maupun wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti alur yang sistematis mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai

dengan mengidentifikasi informasi-informasi penting dari data yang terkumpul, dilanjutkan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori pengambilan keputusan yang relevan. Tahapan analisis ini merujuk pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara siklis dan interaktif antara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Dengan mengikuti prosedur analisis yang sistematis tersebut, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 43 Padang, diketahui bahwa proses pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan kedisiplinan siswa dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Dalam menangani permasalahan kedisiplinan, sekolah melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran.

Tahap awal dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kedisiplinan di SMP Negeri 43 Padang adalah identifikasi masalah melalui mekanisme pengawasan yang sistematis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bentuk pelanggaran yang teridentifikasi mencakup keterlambatan, pelanggaran tata tertib sekolah, kelalaian tugas akademik, membolos, merokok, hingga pelanggaran kategori berat. Pelanggaran tersebut dideteksi melalui tiga jalur utama, yakni pengawasan langsung oleh guru, laporan dari warga sekolah, serta sistem pencatatan pelanggaran siswa yang terdokumentasi secara administratif. Identifikasi yang komprehensif ini menjadi landasan awal bagi sekolah dalam menentukan respons kebijakan yang tepat dan terukur.

Setelah pelanggaran teridentifikasi, sekolah melakukan pengumpulan informasi secara mendalam sebagai dasar analisis sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memahami kondisi latar belakang siswa serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran, baik yang bersumber dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun kondisi psikologis siswa. Data yang terkumpul kemudian dijadikan acuan oleh pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran, dalam merumuskan tindakan yang proporsional. Pendekatan berbasis data ini mencerminkan upaya sekolah untuk menghindari keputusan yang bersifat arbitrer dan memastikan penanganan yang berkeadilan.

Penentuan tindakan atas pelanggaran kedisiplinan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang disesuaikan dengan tingkat dan kategori pelanggaran yang dilakukan siswa. Alternatif tindakan yang tersedia mencakup pemberian teguran lisan, pembinaan karakter, pemberian sanksi edukatif berupa tugas kebersihan, penandatanganan surat perjanjian, hingga pemanggilan orang tua siswa. Untuk pelanggaran yang tergolong berat, penanganan dilanjutkan secara berjenjang oleh guru BK dan kepala sekolah guna memberikan intervensi yang lebih intensif. Tersedianya spektrum tindakan yang bervariasi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan disiplin, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan tetap mengandung nilai pedagogis bagi siswa.

Implementasi kebijakan kedisiplinan di SMP Negeri 43 Padang dilaksanakan melalui penerapan tata tertib sekolah yang disertai pengawasan rutin dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, melainkan juga bersifat preventif melalui pembiasaan perilaku disiplin dalam keseharian siswa. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mengamati perubahan perilaku siswa pasca pemberian pembinaan atau sanksi tertentu sebagai indikator efektivitas kebijakan. Proses evaluasi yang sistematis ini memungkinkan sekolah untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif, sehingga penerapan disiplin dapat terus relevan dan efektif dalam membentuk karakter siswa.

Pembahasan

Hasil penelitian di SMP Negeri 43 Padang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan kedisiplinan siswa telah berlangsung secara sistematis melalui tahapan yang selaras dengan konsep pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan. Tahapan tersebut mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penyusunan alternatif, pemilihan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi hasil keputusan. Kesesuaian ini sejalan dengan temuan Rahmat (2018) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan kepala sekolah yang efektif selalu melewati tahapan yang terstruktur dan melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi sebelum tindakan ditetapkan. Lebih lanjut, Arifuddin et al. (2022) menegaskan bahwa proses pengambilan

keputusan yang sistematis dalam manajemen sekolah terbukti menghasilkan kebijakan yang lebih diterima oleh seluruh warga sekolah karena didasarkan pada pertimbangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap identifikasi masalah yang dilakukan oleh SMP Negeri 43 Padang mencerminkan implementasi nyata dari tahap *intelligence* dalam model pengambilan keputusan Herbert Simon, yakni tahap di mana pengambil keputusan secara aktif mengenali dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Pada tahap ini, sekolah melakukan pengamatan terhadap berbagai bentuk pelanggaran siswa melalui pengawasan guru, laporan warga sekolah, serta pencatatan administratif pelanggaran sebagai basis data awal pengambilan kebijakan. Hidayat dan Wijaya (2020) menemukan bahwa kemampuan kepala sekolah dalam mendeteksi masalah kedisiplinan secara dini merupakan faktor penentu efektivitas kebijakan disiplin, karena keterlambatan dalam identifikasi masalah cenderung memperparah kondisi pelanggaran yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Sulfemi (2019) menegaskan bahwa sistem pencatatan pelanggaran yang terstruktur di sekolah merupakan instrumen vital dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diukur relevansinya terhadap permasalahan aktual yang dihadapi siswa.

Proses pengumpulan informasi yang dilakukan sekolah sebelum menetapkan tindakan atas pelanggaran siswa mencerminkan penerapan prinsip keputusan berbasis fakta yang menjadi fondasi manajemen pendidikan yang profesional. Kristiawan et al. (2019) menunjukkan bahwa efektivitas keputusan dalam manajemen pendidikan meningkat secara signifikan ketika proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai sumber informasi yang saling melengkapi. Temuan ini diperkuat oleh Pratiwi dan Suharno (2021) yang menyimpulkan bahwa sekolah yang menerapkan pengumpulan data pelanggaran secara komprehensif sebelum pengambilan keputusan menghasilkan kebijakan disiplin yang lebih proporsional dan minim resistensi dari siswa maupun orang tua. Lebih jauh, Nugroho et al. (2023) menekankan bahwa keterlibatan multipihak seperti guru BK, wali kelas, dan wakil kepala sekolah dalam proses pengumpulan informasi terbukti memperkaya perspektif analisis sehingga keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkeadilan.

Penyusunan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan oleh sekolah mengindikasikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara impulsif, melainkan melalui pertimbangan sistematis terhadap berbagai pilihan tindakan yang tersedia. Alternatif yang disiapkan sekolah mencakup spektrum yang luas, mulai dari teguran lisan, pembinaan karakter, sanksi edukatif, penandatanganan surat perjanjian, pemanggilan orang tua, hingga penanganan berjenjang oleh guru BK dan kepala sekolah. Hal ini selaras dengan temuan Wahyudi dan Sopandi (2020) yang menyatakan bahwa tersedianya alternatif kebijakan yang beragam dalam penanganan pelanggaran disiplin mencerminkan kematangan manajerial sekolah dalam merespons permasalahan siswa secara kontekstual dan tidak seragam. Marpaung (2022) menambahkan bahwa penyusunan alternatif yang mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran secara berjenjang merupakan praktik terbaik dalam manajemen kedisiplinan sekolah, karena memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersifat proporsional dan tidak mengabaikan hak-hak siswa sebagai peserta didik.

Pelaksanaan kebijakan kedisiplinan di SMP Negeri 43 Padang yang lebih mengutamakan pendekatan pembinaan karakter dibandingkan pendekatan punitif semata mencerminkan pemahaman yang sejalan dengan paradigma manajemen disiplin berbasis pendidikan karakter yang berkembang dalam kajian manajemen pendidikan kontemporer. Kurniawan (2020) menegaskan bahwa kebijakan disiplin yang efektif di sekolah menengah adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan fungsi penegakan aturan dengan fungsi pembentukan karakter, sehingga siswa tidak sekadar patuh karena takut sanksi tetapi karena memahami nilai-nilai yang mendasari peraturan tersebut. Temuan ini diperkuat oleh Rosyadi dan Pardjono (2015) yang menemukan bahwa pendekatan disiplin berbasis pembinaan di sekolah menengah pertama terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka pelanggaran berulang dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan hukuman fisik maupun administratif. Lebih lanjut, Afriansyah (2019) menyimpulkan bahwa orientasi pembinaan dalam kebijakan disiplin sekolah berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan iklim sekolah yang positif, yang pada gilirannya mendukung peningkatan prestasi akademik dan sosial siswa secara menyeluruh.

Evaluasi Kebijakan sebagai Mekanisme Penjaminan Efektivitas Keputusan Tahap evaluasi yang dilaksanakan sekolah terhadap kebijakan kedisiplinan merupakan komponen penutup yang sangat krusial dalam siklus pengambilan keputusan yang komprehensif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan disiplin di SMP Negeri 43 Padang sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan aturan dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua siswa. Hal ini sejalan dengan temuan Anwar et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa evaluasi berkala terhadap

implementasi kebijakan disiplin sekolah merupakan mekanisme esensial yang memungkinkan pimpinan sekolah untuk mengidentifikasi celah pelaksanaan dan melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif berdasarkan data empiris. Lebih lanjut, Mukhtar dan Iskandar (2023) menekankan bahwa keberhasilan evaluasi kebijakan kedisiplinan sangat bergantung pada keterlibatan aktif orang tua sebagai mitra strategis sekolah, karena perilaku disiplin siswa tidak dapat dibentuk secara optimal apabila hanya mengandalkan intervensi institusional di lingkungan sekolah semata.

Secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 43 Padang telah menunjukkan keterpaduan yang baik antara tahapan analitis, partisipatif, dan evaluatif sebagaimana yang menjadi standar dalam praktik manajemen pendidikan yang efektif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Oktavia dan Sontani (2019) yang menemukan bahwa sekolah yang menerapkan proses pengambilan keputusan secara kolaboratif dan berbasis data menghasilkan kebijakan disiplin yang lebih konsisten, adil, dan diterima secara luas oleh komunitas sekolah. Selain itu, Fitriani et al. (2021) menegaskan bahwa keterpaduan antara model pengambilan keputusan Simon dan kerangka langkah-langkah Terry dalam praktik manajemen sekolah di Indonesia terbukti relevan dan dapat dioperasionalkan secara efektif dalam berbagai konteks kelembagaan pendidikan, termasuk dalam penanganan permasalahan kedisiplinan siswa. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya memvalidasi relevansi teori pengambilan keputusan dalam konteks manajemen pendidikan di Indonesia, tetapi juga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip manajerial tersebut diimplementasikan secara praktis di sekolah menengah pertama.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan sekolah dalam penerapan kebijakan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 43 Padang dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penyusunan alternatif, analisis alternatif, pemilihan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi lebih menekankan pada pembinaan karakter dan tanggung jawab siswa.

Saran yang dapat diberikan yaitu sekolah perlu mempertahankan konsistensi dalam menerapkan tata tertib, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, serta terus mengembangkan pendekatan disiplin yang bersifat edukatif agar mampu membentuk karakter siswa secara berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SMP Negeri 43 Padang yang telah memberikan kesempatan dan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, H. (2019). Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.24036/bmp.v8i1.106ilus>
- Anwar, S., Harapan, E., & Destiniar. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah terhadap Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11943–11951. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4032>
- Arifin, M., & Barnawi. (2012). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Ar-Ruzz Media.
- Arifuddin, Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2022). Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(1), 22–31. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i1.46738>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi ke-4, A. Fawaid & R. K. Pancasari, Penerjemah). Pustaka Pelajar.
- Fitriani, Y., Kristiawan, M., & Asvio, N. (2021). The Role of Headmaster for Improving Quality of Education. *Judges: Journal of Educational Management*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.46627/judges.v1i1.6>
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2020). Pengambilan Keputusan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.1422>

- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2019). Manajemen Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2734>
- Kurniawan, M. I. (2020). Manajemen Kedisiplinan Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 33–41. <https://doi.org/10.33751/jmp.v8i1.1786>
- Marpaung, J. (2022). Manajemen Penanganan Pelanggaran Disiplin Siswa Berbasis Restoratif di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2345>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, & Iskandar. (2023). Peran Orang Tua dalam Penguatan Kebijakan Disiplin Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/jipp.v10i1.56781>
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, B. S., Suryadi, & Purwanti, E. (2023). Kolaborasi Multipihak dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Disiplin Sekolah Menengah. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 6(2), 89–101. <https://doi.org/10.17977/um027v6i22023p089>
- Oktavia, Y., & Sontani, U. T. (2019). Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dan Dampaknya terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(1), 47–55. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i1.14954>
- Pratiwi, N., & Suharno. (2021). Implementasi Kebijakan Disiplin Siswa di sekolah Menengah Pertama Negeri. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(1), 56–67. <https://doi.org/10.21831/amp.v9i1.35672>
- Rahmat, A. (2018). Manajemen Humas Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.33751/jmp.v5i2.884>
- Rosyadi, Y. I., & Pardjono. (2015). Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(1), 124–133. <https://doi.org/10.21831/amp.v3i1.6276>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulfemi, W. B. (2019). Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa. *Jurnal Seminar Nasional Pendidikan*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.31227/osf.io/p93dz>
- Usman, H. (2019). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Edisi ke-4). Bumi Aksara.
- Wahyudi, I., & Sopandi, A. (2020). Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Sekolah Berbasis Data. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.17977/um025v5i12020p001>
- Wiyani, N. A. (2013). *Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas yang Kondusif*. Ar-Ruzz Media.